

MEMAHAMI KONSEP RUANG MENURUT HENRI LEFEBVRE

Paulus Bagus Sugiyono

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
paulus.bagus@ui.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teoretis mengenai pemaknaan atas kota dan pengelolaannya dalam ruang lingkup studi sosiologi perkotaan merupakan sesuatu yang penting untuk diikuti. Selalu ada perkembangan baru di dalam konteks dialektika teoretis. Artikel ini sendiri bermaksud untuk menjelaskan konsep ruang menurut seorang sosiolog *cum* filsuf dari Prancis yang bernama Henri Lefebvre. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Thompson (2017), Christian dan Desmiwati (2018), dan Nurhadi *et al.* (2019) yang berupaya melihat kontekstualisasi konsep ruang Lefebvre dalam fenomena sosiologis, dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif, artikel ini berupaya untuk menjelaskan konsep ruang menurut Lefebvre *per se* itu sendiri. Temuan dari artikel ini menunjukkan tiga hal penting yang dapat ditarik dari konsep ruang Lefebvre, yakni produksi ruang di kota, kontestasi konflik ruang, dan partisipasi masyarakat sebagai perwujudan konkret hak atas kota.

Kata kunci : Produksi Ruang, Konflik Ruang, Hak Atas Kota, Henri Lefebvre.

ABSTRACT

It is important to understand all various concepts of the city and its management in the perspective of urban sociology. There is always new development in the context of theoretical dialectics. This article itself intends to explain the concept of space according to a french sociologist *cum* philosopher, namely Henri Lefebvre. It takes a different approach of analysis compared with previous research conducted by Thompson (2017), Christian and Desmiwati (2018), and Nurhadi *et al.* (2019) which intend to contextualize the concept of space according to Lefebvre in various sociological phenomena. Using descriptive analysis within a qualitative method, this article attempts to explain the concept of space according to Lefebvre *per se* itself. The finding of this article shows three important issues that could be taken from the concept of space offered by Lefebvre. Those are the production of space in a city, contestation of space conflict, and participation of city residents as a manifestation of the concept of right to the city.

Keywords: Space Production, Space Conflict, Right To The City, Henri Lefebvre.

PENDAHULUAN

Telaah konsep mengenai ruang dalam khazanah sosiologi perkotaan mengambil tempat yang cukup penting dalam konteks historis dan genealogis perkembangan teori. Bermula dari pendekatan perkotaan yang diusung oleh mazhab Chicago yang memberikan pengaruh besar sebelum Perang Dunia II dari Amerika Serikat, pemaknaan konsep mengenai ruang kemudian selalu mengalami perubahan dalam kontestasi kritik dan “pemurnian”. Dalam kerangka pikir hegelian, konsep yang baru selalu hadir sebagai sebuah anti tesis yang bukan hanya sekadar mengkritik tesis yang ada sebelumnya, tetapi juga mengupayakan sebuah bangunan baru yang lebih kokoh sebagai sebuah sintesis konsep yang semakin adekuat untuk memotret dan menganalisis fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan.

Dalam artikelnya yang berjudul “Teori Ruang dalam Sosiologi Perkotaan: Sebuah Pendekatan Baru”, Dwianto (2012) menjabarkan bagaimana konsep ruang ini mengalami transformasinya, mulai dari mazhab Chicago yang lahir di Amerika Serikat, hingga kemudian kemunculan teori *New Urban Sociology* (NUS) yang mengalami masa kejayaan di tahun 1970 hingga 1980-an. Di satu sisi, konsep ruang di masa mazhab Chicago lebih melihat ruang sebagai sesuatu yang secara alamiah “sudah ada di sana”. Ia hadir secara statis sebagai wadah terjadinya aktivitas-aktivitas masyarakat perkotaan. Manuel Castells mengkritik pemahaman ini sebagai sebuah “*urban ideology*”, sedangkan Edward Soja menanggapinya dengan istilah “*spatial illusion*” (Castells, 1997; Soja 1989 sebagaimana dikutip dalam Dwianto, 2012). Di sisi lain, NUS melihat ruang sebagai sesuatu yang lebih “cair” dan dinamis. Ruang adalah sesuatu yang di dalam dirinya sendiri memiliki sifat membentuk. Ia selalu bergerak dan berubah dari waktu ke waktu. Berbagai aspek hadir untuk terlibat dalam proses bagaimana ruang dihadirkan dalam masyarakat. Salah satu sosiolog yang berdiri di dalam posisi ini adalah Henri Lefebvre.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berupaya menggunakan konsep ruang yang ditawarkan oleh Lefebvre untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan. Matthew Thompson (2017), misalnya, menggunakan konsep ruang Lefebvre untuk menganalisis produksi ruang yang terjadi di wilayah Granby, Liverpool, Inggris. Thompson (2017) berupaya melihat bagaimana kebijakan pemerintah diambil untuk menata wilayah Granby menjadi sebuah wilayah yang dianggap layak huni dan lebih modern. Penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa di dalam perjalanan panjang penataan wilayah Granby tersebut, terdapat “kekerasan-kekerasan” tertentu yang dialami oleh masyarakat sekitar terkait kebijakan yang diambil

oleh pemerintah. “Kekerasan” yang dimaksud misalnya adalah bagaimana masyarakat mengalami penggusuran dalam sebuah program yang dinamakan “*Slum Clearance Programme*”. Melalui kerangka berpikir Lefebvre, “kekerasan” ini sebenarnya secara intrinsik sudah terkandung dalam proses yang terjadi dalam ruang abstraksi (*abstraction space*) yang dicanangkan oleh pemerintah dan para perencana kota (*urban planner*) lainnya.

Di dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian sejenis juga telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Christian dan Desmiwati (2018) mengambil studi kasus mengenai konflik agraria yang terjadi dalam pengelolaan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Konflik ini melibatkan tiga pihak yang terkait, yakni masyarakat lokal yang berhadapan dengan pihak swasta sebagai perusahaan wisata yang menerima dukungan dari pemerintah lokal. Menggunakan konsep produksi ruang Lefebvre, ditambah dengan konsep akumulasi dengan perampasan David Harvey, penelitian mereka menemukan bahwa telah terjadi komodifikasi ruang dengan mengubah sumber agraria menjadi “alat” untuk mengumpulkan kapital. Persis di sinilah terlihat kuasa dan cengkeraman kaum kapitalis melalui perbagai cara dan perpanjangan tangannya untuk menguasai wilayah-wilayah perkotaan. Selain itu, dampak lain yang terjadi adalah bahwa masyarakat setempat cenderung mengalami eksklusi sosial, sebab pariwisata yang dikembangkan bersifat eksklusif. Terjadi dominasi kuasa yang dikendalikan oleh kaum kapitalis.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhadi *et al.* (2019) menggunakan studi kasus mengenai perubahan sistem pengelolaan lahan dari pertanian menjadi pariwisata Waterland di sebuah desa di Jawa Timur. Perubahan ini terlihat dalam bentuk pembuatan industri pariwisata yang menguntungkan para investor tertentu saja. Sementara itu, sebelum industri ini dibuat, masyarakat setempat sebenarnya telah mampu hidup secara damai tanpa industri pariwisata tersebut. Lebih parahnya lagi, ruang abstrak yang tercipta melalui kehadiran industri pariwisata ini menyebabkan kerusakan ekologi wilayah setempat, secara khusus terkait dengan ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat. Para peneliti melihat bahwa sebenarnya masyarakat setempat belum siap untuk menerima kehadiran industri pariwisata Waterland ini.

Berbeda dengan artikel-artikel yang menulis mengenai kontekstualisasi konsep ruang Lefebvre sebagaimana telah dijelaskan di atas, artikel ini lebih berupaya untuk menelusuri konsep mengenai ruang menurut Lefebvre itu sendiri. Artikel ini berupaya untuk melanjutkan artikel yang ditulis oleh Dwianto (2012) dengan cara memperdalam secara khusus bagaimana Lefebvre memaknai ruang dalam konteks perkotaan. Dua pertanyaan besar yang dijawab di dalam artikel ini adalah mengenai

apa yang dimaksud dengan ruang menurut Lefebvre dan bagaimana ruang yang dimaksud mengalami pembentukan.

METODE PENELITIAN

Sebagai metodologi penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, dengan cara menelusuri konsep mengenai ruang menurut Henri Lefebvre dan bagaimana ruang tersebut dapat terbentuk (Bryman, 2012). Data-data sekunder dalam bentuk artikel ilmiah, studi, dan penelitian lain terkini yang ada sebelumnya digunakan untuk mendalami konsep ruang yang ditawarkan Lefebvre tersebut. Kehadiran konsep ruang Lefebvre ini, bagaimanapun, mesti ditempatkan dalam historisitas kehadiran teori NUS yang membawa kesegaran baru sebagai pisau analisis fenomena yang terjadi di perkotaan dewasa ini. Di bagian akhir, dijelaskan juga konsep mengenai hak atas kota sebagai sebuah bentuk perwujudan perlawanan yang diusulkan Lefebvre untuk mengangkat suara dan partisipasi masyarakat lokal dan mengikis dominasi kapitalis yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menguasai wilayah perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Kehidupan Henri Lefebvre

Henri Lefebvre (1901-1991) merupakan seorang sosiolog yang lahir di Hagetmau, Prancis pada tanggal 16 Juni 1901 dan meninggal beberapa hari sesudah merayakan ulang tahunnya yang ke-90, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1991 di Navarrenx, Prancis. Beberapa saat setelah meninggalnya Lefebvre, obituari *Le Monde* mengungkapkan bahwa dunia telah kehilangan seorang filsuf klasik terakhir, sekaligus juga seorang pemikir Marxian Prancis yang begitu berdedikasi tinggi. Tidak heran bahwa beberapa tulisan yang muncul kemudian menyebut kehidupan Lefebvre sebagai sebuah “petualangan seseorang yang menghidupi makna dialektika” (*adventures of a dialectician*).

Rentang hidup Lefebvre yang melintasi satu abad tentu memberikan kisah-kisah tersendiri yang membentuk dirinya. Ia pernah bergabung ke Partai Komunis Prancis (*French Communist Party*) untuk melawan fasisme yang terjadi melalui sebuah Gerakan Penolakan (*Resistance Movement*). Ia hidup di sebuah zaman di mana modernitas tumbuh dan mulai berkembang secara pesat. Dalam dunia sosial-politik, ia juga merasakan hawa panas terjadinya Perang Dingin yang memperebutkan hegemoni ideologi pemerintahan, serta peristiwa runtuhan tembok Berlin di Jerman. Tidak hanya itu, Lefebvre juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang terlihat

dari komitmennya untuk tetap mengajar filsafat dan sosiologi di sejumlah kampus dan sekolah menengah, bahkan ikut menjadi pelopor gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1968. Dalam hal inilah, Lefebvre merupakan sosok “*man of action as well as ideas*” (Merrifield, 2006: xxi).

Keseimbangan antara aksi dan pemikiran, praksis dan teori, ini pulalah yang ditangkap oleh Francesco Biagi. Biagi (2020) melihat bahwa semasa hidupnya, Lefebvre selalu berusaha membentuk sebuah filsafat yang “baru”. Mengikuti jejak langkah Karl Marx dan Friedrich Engels, Lefebvre tidak pernah berhenti hanya pada yang tertera secara teoretis saja. Perspektif dasar dari “kebaruan” filsafatnya dapat diidentifikasi dari interpretasi atas pemikiran kedua tokoh Jerman yang menjadi panutannya, serta kecenderungannya untuk menyeimbangkan “teori” filosofis dengan “praksis” politik. Dengan kata lain, Lefebvre memiliki cita-cita bahwa teori, konsep, dan pemikiran sudah semestinya memberikan dampak nyata bagi kemajuan peradaban dan proses humanisasi kehidupan manusia dari waktu ke waktu.

Konteks Pemikiran Lefebvre

Sebagai seorang ilmuwan sosial, Lefebvre tidak melepaskan dirinya begitu saja dari konteks-konteks sosial yang ada di sekitarnya. Pemikirannya lahir dari bagaimana ia merefleksikan perkembangan kehidupan masyarakat yang ia alami. Secara umum, sebenarnya Lefebvre sendiri banyak memberikan dan mengembangkan pemikirannya mengenai perkotaan dari perspektif sosiologis (*urban sociology*). Meski demikian, ia tidak memulai kariernya pertama-tama di bidang ini. Ia berpijak mula-mula pada ilmu sosiologi yang lebih menitikberatkan pada perkembangan perdesaan (*rural sociology*), hingga akhirnya menyadari bahwa *locus* perubahan dan perkembangan zaman lebih mengambil tempatnya di wilayah perkotaan yang ditandai dengan masifnya tingkat urbanisasi, baik dalam wujud mobilitas maupun transformasi wilayah menjadi urban (Biagi, 2020).

Pemikiran Lefebvre sendiri, terutama mengenai sosiologi perkotaan, terletak dalam konteks pembangunan yang terjadi pasca perang dunia (*post-war development*) yang memporak-porandakan negara-negara barat, secara khusus Prancis. Negara-negara tersebut tidak ingin berkubang telulu lama di dalam kehancuran dan kekalahannya semasa perang. Untuk itu, pembangunan yang masif dilakukan bukan hanya semata-mata untuk menata kembali kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menggenjot roda perekonomian.

Francesco Biagi (2020) secara khusus menggarisbawahi sudut pandang yang digunakan oleh Lefebvre dalam melihat pembangunan yang terjadi di wilayah-wilayah perkotaan ini. Ia mengatakan bahwa Lefebvre lebih tertarik untuk mengambil sudut pandang pembangunan dari kacamata

kelompok pinggiran (*periphery*). Pilihan kata “pinggiran” ini tidak semata-mata berarti harfiah atau fisik yang mengacu kepada wilayah pinggiran, tetapi lebih kepada kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam proses pembangunan perkotaan. Hanya melalui sudut pandang “kelompok pinggiran” inilah, realitas perkotaan dapat menunjukkan kesejadian dirinya. Sudut pandang ini menjadi pangkal pemikirannya juga untuk mengkritik Fordisme yang merupakan ideologi fungsionalis pembangunan. Dengan studi kasus Kota Paris, Lefebvre mengkritik bahwa di balik keindahan dan keanggunannya, terdapat ketidaksetaraan pembangunan, terutama yang dirasakan oleh kelompok migran yang tinggal di Prancis.

Para migran ini berasal dari beberapa negara, seperti Aljazair, Moroko, Tunisia, dan Portugal. Kehidupan para pekerja ini cukup memprihatinkan. Tempat tinggal mereka kurang begitu memperhatikan kecukupan kebutuhan air, sanitasi, dan sebagainya. Mengutip dari tulisan yang disampaikan oleh Sayad (1999), Biagi (2020) mengatakan bahwa ada dua situasi yang dialami oleh para migran. Dua situasi ini disebut dengan istilah “*double absence*”. Mereka sendiri pergi dari negara asal mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Prancis, sebuah tanah terjanji yang menjunjung semboyan *liberte-egalite-fraternite*. Sedangkan, di Prancis, mereka mengalami sebuah ketidakadilan sosial, bukan hanya dipandang sebelah mata, tetapi juga tidak dilihat dan diakui keberadaannya. Mereka mengalami eksklusi sosial dalam kehidupan perkotaan.

Sampai di sini, tampak bahwa Lefebvre merupakan seorang pemikir Marxian, baik secara teoretis filosofis maupun praktis dalam melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Inspirasi dari Marx didapat oleh Lefebvre yang melihat pengaruh negara (*state*) dan kapitalisme (*capitalism*) dalam perwujudan pembangunan yang tidak merata. Lefebvre berupaya menggali bagaimana masyarakat sipil merebut hegemoni negara dan kapitalisme untuk kemudian mengelola ruang-ruang perkotaan (Purcell, 2014). Meski demikian, Lefebvre bukanlah seorang Marxian garis keras. Ia memantapkan posisinya sebagai Marxian sayap kiri, misalnya, dengan mengkritik determinisme kapitalisme dan menempatkan “*the urban*” sebagai bagian dari superstruktur. Padahal, “*the urban*” memiliki dinamikanya sendiri, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, yang mampu memberi signifikansi bagi perkembangan perkotaan.

Produksi Ruang

Rob Shields (1999) mengatakan bahwa kontribusi utama yang diberikan oleh Lefebvre bagi perkembangan pengetahuan sosial adalah bagaimana Lefebvre melihat konstruksi sosial atas ruang. Atau, dengan kata lain, ia ingin merumuskan bagaimana ruang itu diproduksi secara sosial, sebab

pembentukan ruang selalu mengisyaratkan interrelasi yang terbentuk dari berbagai macam pihak yang terkait. Pihak-pihak ini memiliki kepentingannya (*interest*) masing-masing dan selalu berupaya untuk mewujudkan kepentingannya bagaimanapun caranya. Permasalahannya persis terjadi ketika kepentingan dari beragam pihak ini saling bertemu satu sama lain. Terjadilah konflik sosial. Dan, yang menjadi korban adalah kelompok kecil dan terpinggirkan, yakni masyarakat perkotaan itu sendiri.

Lefebvre memaknai ruang sebagai sebuah isu yang melingkupi banyak disiplin ilmu. Dalam hal ini, Lefebvre bermaksud mengangkat ruang ke dalam sebuah perdebatan yang lebih konkret, yakni mempertemukan antara ruang sebagai sesuatu yang materiil dan memiliki bentuk fisik yang nyata dengan fenomena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat perkotaan. Sebagai contoh, beberapa dekade terakhir ini, investasi perkotaan yang masif yang terwujud dalam bentuk pembangunan jalan, gedung tinggi, wilayah perkantoran, pusat perbelanjaan, jalan kereta api, serta berbagai infrastruktur lainnya ternyata hanya dirasakan manfaatnya oleh sekelompok orang saja, tetapi tidak bagi sekelompok masyarakat lainnya.

Salah satu *magnum opus* yang ditulis oleh Lefebvre terkait dengan konstruksi atau produksi ruang ini adalah karyanya yang berjudul *The Production of Space* yang ditulis pada tahun 1974. Di dalam karya ini, ia berupaya untuk menganalisis kota dalam skalanya yang lebih luas lagi. Lebih jauh lagi, di dalam karya tersebut, ia berpendapat bahwa identitas sebuah wilayah ditentukan oleh interrelasi antaraktivitas yang terkait dengan aspek politik dan ekonomi. Dalam modus historis inilah, produksi ruang berjalan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, menurut Shields (1999), Lefebvre berupaya meninggalkan pengertian klasik mengenai ruang, yang dalam beberapa teks sosiologi dimaknai juga sebagai “teritori”, menuju ke pengertian baru yang melihat ruang dalam diskursus “meta-tingkat” (*meta-level*) bagaimana secara sosial ruang itu dibentuk. Di sinilah transformasi makna ruang terjadi. Lefebvre hadir untuk menawarkan sebuah kebaruan.

The Production of Space mendevosikan diri pada sebuah fenomenologi radikal untuk melihat ruang melalui pendekatan yang lebih humanis, di mana hak atas kota yang dimiliki baik oleh individu maupun komunitas terabaikan oleh upaya pengabstraksi ruang yang dilakukan oleh kapitalisme dalam berbagai bentuknya, serta pengetahuan teknokratik terutama oleh pihak negara atau pemerintah. Dalam sudut pandang yang lain, Lefebvre sebenarnya ingin mengatakan juga bahwa bagaimana kapitalisme telah menancapkan pengaruhnya dalam-dalam dan memiliki peran besar dalam membentuk ruang-ruang “privat” di wilayah perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan

modal atau keuntungan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Shields, 1999). Hal ini dilakukannya dengan berbagai macam cara.

Francesco Biagi (2020) mengutip sebuah tulisan Lefebvre (2001) yang cukup menarik. Kutipan tulisan ini diambil oleh Biagi untuk menggambarkan bagaimana kota sebagai sebuah ruang itu mengalami pembentukannya dan pembentukan ini sifatnya kompleks sebab mengisyaratkan pengaruh dari berbagai macam aspek kehidupan. Ia mengutip demikian,

“[T]he city is a whole; ... the city casts on the soil a society in its fullness, a social totality or a society retained as totality, including its culture, its institutions, its ethics, its values, soon its superstructures, including its economical basis and the social relations that form its actual structure.”

Dari penjelasan Lefebvre tersebut, kita dapat melihat adanya unsur totalitas (*totality*) yang menyeluruh di dalam konsep kota. Kota, menurut Lefebvre, tidak hanya merujuk pada wujud fisik atau ikatan sosial yang terjadi di dalamnya, tetapi keseluruhan dan interseksi dari setiap aspek yang ada, baik secara sosial, ekonomi, infrastruktur, nilai sosial dan etika, maupun budaya. Biagi (2020) melanjutkan, interseksi dari keseluruhan aspek inilah yang akhirnya terikarnasi dan terejawantahkan secara nyata dalam dimensi spasial wilayah perkotaan.

Lefebvre membagi dua tingkatan (*level*) yang turut berpartisipasi dalam pembentukan kota. Kedua tingkatan ini adalah “*the near order*” dan “*the far order*”. Yang dimaksud dengan “*the near order*” adalah segala relasi yang terbangun antarindividu dan/atau kelompok yang kurang lebih bersifat meluas dan terorganisasi. Sedangkan, “*the far order*” merupakan dimensi-dimensi masyarakat yang dipengaruhi oleh institusi politis dan budaya (Lefebvre, 1996 sebagaimana dikutip dalam Biagi, 2020). Dengan demikian, Lefebvre ingin menunjukkan bahwa inkarnasi kota merupakan sebuah dialektika antara “*the near order*” dan “*the far order*”. Dialektika ini terjadi terus-menerus sebagai sebuah proses yang berkelanjutan (*on-going formation*). Dalam hal inilah kita dapat mengatakan bahwa Lefebvre juga mengadopsi teorema pemikiran Hegel di dalam konsep dialektikanya

Lefebvre melihat bahwa kota sungguh berada dalam ancaman industrialisasi kapitalis. Kota dimaknai sebagai “objek” yang diciptakan oleh tindakan manusia dipahami sejauh relasi antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam setiap tingkatan dalam masyarakat. Juga, kota dipahami sebagai tempat terjadinya pertukaran dan pencarian keuntungan, untuk menarik wisatawan, serta penanaman modal. Kita bisa melihat fenomena ini melalui penelitian yang dilakukan oleh Christian dan Desmiwati (2018) dan Nurhadi *et al.* (2019). Gaya hidup yang dilakukan cenderung mengalami homogenisasi dalam konteks proses urbanisasi. Inilah yang oleh Lefebvre disebut dengan

depeasantization dan *touristification*. Proses “objektifikasi” atau menggunakan terminologi Marx, “komodifikasi wilayah perkotaan”, inilah yang akhirnya mengorbankan warga perkotaan yang seringkali tidak punya kuasa untuk membela diri. Posisi politisnya lemah.

Kontestasi Ruang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Lefebvre berpendapat bahwa ada beragam aspek yang turut serta dalam membentuk ruang. Aspek-aspek tersebut di antaranya adalah aspek ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh dari aspek-aspek ini akhirnya membentuk dua ruang yang terpisah satu sama lain secara signifikan. Kedua ruang yang dimaksud adalah ruang abstrak (*abstract space*) dan ruang sosial (*social space*).

Di satu sisi, para pemilik modal atau bisnis, serta pemerintah seringkali mengkonsepsikan ruang melalui pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, seperti ukuran, luas, lokasi, serta yang paling penting adalah keuntungan yang didapat dari proses objektifikasi ruang. Kerangka abstraksi digunakan untuk memetakan wilayah perkotaan. Dalam wilayah inilah, Lefebvre menyebut ruang sebagai ruang abstrak (*abstract space*). Sementara itu, di sisi lain, individu-individu yang ada dalam masyarakat menggunakan ruang yang ada di lingkungannya sebagai tempat untuk tinggal, hidup, dan beraktivitas secara konkret. Mereka menggunakan wilayah perkotaan dengan bebas dan tanpa tendensi apapun dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Dalam wilayah inilah, Lefebvre menyebut ruang sebagai ruang sosial (*social space*).

Berakar mendalam pada pemikiran Marxian, Lefebvre mengatakan bahwa akan terjadi konflik atau friksi di antara dua ruang ini. Ruang yang dikonsepkan secara abstrak untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya akan “bertabrakan” dengan ruang yang digunakan secara nyata sebagai tempat masyarakat beraktivitas. Konflik ini tentu terjadi, karena adanya perbedaan ekspektasi dan kepentingan dari dua kelompok kelas sosial mengenai ruang di wilayah perkotaan (Gottdiener *et al.*, 2019).

Secara lebih lanjut, Zieleniec (2018) menjelaskan kontestasi ruang Lefebvre ini dengan teorema triad. Disebut sebagai “triad” sebab ruang merupakan “interaksi” antara ketiga wilayah sosial yang saling berkelindan satu sama lain. Ketiga wilayah inilah yang secara sosial memproduksi ruang secara terus-menerus. Dan, seturut tekanan pemikiran Lefebvre, ruang ini secara kontinyu diproduksi, direproduksi secara masif, terstruktur, dan terorganisir demi memenuhi kebutuhan kelas kapitalis yang mencoba mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Wilayah yang pertama sering disebut dengan praktik spasial (*spatial practice*). Mengutip Merrifield (1993: 524), Zieleniec (2018) mengatakan bahwa praktik spasial menggambarkan “struktur kehidupan sehari-hari dan realitas masyarakat perkotaan yang luas, yang membentuk kohesi sosial masyarakat, keberlanjutan, dan kompetensi spasial tertentu”. Dengan kata lain, di dalam wilayah ini, masyarakat memiliki relasi-relasi tertentu dan mengarahkan, serta “menegosiasikannya” dalam jalan yang konsisten dan koheren terkait bagaimana ruang tersebut dimaknai dan digunakan.

Wilayah yang kedua disebut dengan representasi ruang (*representations of space*). Lefebvre menyebut wilayah ini sebagai “wilayah para ilmuwan, perencana dan pengelola kota, teknokrat, juga para insinyur sipil”. Mengapa demikian? Sebab, mereka-mereka itulah yang memiliki kemampuan, kuasa, dan otoritas yang nyata dalam “merepresentasikan”, mengelola, dan menentukan bagaimana ruang atau wilayah di dalam perkotaan itu dibentuk. Wujud nyata representasi ini terlihat dalam bagaimana rencana, map, model, dan diagram pengelolaan perkotaan dibuat. Dengan demikian, tampak bahwa diskursus perkotaan didominasi oleh mereka yang memiliki kuasa. Lefebvre bahkan menyebutkan bahwa “representasi apapun menjadi bersifat ideologis ketika mereka memiliki kontribusi dalam menentukan bagaimana wilayah perkotaan dibentuk dan dikelola”. Pilihan kata “ideologis” ini menjadi penting, sebab menggambarkan bukan hanya ekspresi praktis, tetapi juga suatu paradigma atau pola pikir yang terutama menentukan hubungan kuasa atau juga subordinatif antara penguasa dan yang dikuasai.

Sementara itu, wilayah yang ketiga disebut dengan ruang representasional (*spaces of representations*). Yang dimaksud dengan wilayah ini adalah “pertemuan” antara praktik spasial yang menggambarkan bagaimana masyarakat perkotaan menggunakan ruangnya sehari-hari melalui beragam kegiatan dengan representasi ruang sebagaimana para pengelola kota merencanakan dan mengabstraksikan pengelolaan wilayah perkotaan. Di dalamnya terdapat “benturan” sebab apa yang dilakukan masyarakat dalam wilayah sosialnya bisa tidak sesuai dengan apa yang diabstraksikan dan dikonseptualisasikan oleh pengelola perkotaan. Dengan kata lain, masyarakat tinggal dan beraktivitas di suatu wilayah yang kuasa dan politiknya dikendalikan dan didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sadar atau tidak.

Hak atas Kota

Lefebvre tidak hanya melihat wilayah perkotaan sebagai ruang konflik yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan budaya, tetapi juga menarik refleksinya yang lain ke arah bagaimana konflik mesti diselesaikan dan perjuangan atas keadilan kota harus dilakukan. Ketika melihat terjadinya fenomena

ketidaksetaraan dan ketidakadilan pembangunan di wilayah perkotaan, Lefebvre mengemukakan pendapatnya mengenai “*right to the city*”. Pamungkas (2016) mengatakan bahwa terjemahan umum yang biasanya digunakan terkait terminologi ini adalah “hak atas kota”. Meski demikian, ada pula bentuk terjemahan lainnya yang juga seringkali digunakan di dalam teks-teks ilmiah berbahasa Indonesia, yakni “kedaulatan para penghuni kota”.

Terkait hak atas kota ini, dengan cermat Marcuse (2009) mengutip penjelasan yang diberikan oleh Lefebvre (1967: 158) demikian,

“... the right to the city is like a cry and a demand. This right slowly meanders through the surprising detours of nostalgia and tourism, the return to the heart of the traditional city, and the call of the existent or recently developed centralities.”

Dalam kutipan yang lain, Marcuse (2009) mencatatnya demikian,

“... the right to information, the rights to use multiple services, the right of users to make known their ideas on the space and time of their activities in urban areas; it would also cover the right to the use of the center. (Lefebvre, 1991: 34)”

Di dalam kutipan yang pertama, Marcuse (2009) menekankan dua kata yang menjadi pilihan Lefebvre, yakni tangisan (*cry*) dan permintaan (*demand*). Marcuse (2009) melihat bahwa kedua kata ini sebenarnya merujuk kepada siapa hak atas kota itu ditujukan (*whose right*). Mereka yang memiliki hak itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang hak, kesempatan, dan partisipasinya terhadap wilayah perkotaan terampas. Dalam hal ini, mereka bukan hanya mengalami eksklusi sosial secara vertikal dalam rupa deprivasi ekonomi, tetapi juga secara horizontal di mana akses dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kota dibatasi oleh pihak-pihak tertentu.

Di dalam kutipan yang kedua, Marcuse (2009) menjelaskan terminologi “hak” menurut Lefebvre itu secara agak lebih konkret. Lefebvre menyebutkan bahwa hak-hak itu, misalnya, terwujud dalam beberapa kemungkinan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan beragam pelayanan, hak untuk mengungkapkan secara bebas pendapat mereka mengenai aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan yang, dalam titik tertentu, terkait dengan bagaimana kota itu dikelola untuk mengakomodasi aktivitas-aktivitas yang terjadi.

Lebih lanjut, terkait dengan hak yang dimaksud oleh Lefebvre, Biagi (2020) berpendapat bahwa hak bukan hanya terkait dengan terminologi hukum. Akan tetapi, Lefebvre ingin menekankan fenomena konkret bagaimana hak itu terwujudnyatakan dalam segenap konflik sosial dan perjuangan yang mengiringi. Dengan demikian, konsep mengenai “*right to the city*” mengusung sebuah emansipasi

dalam konteks spasial tertentu. Ada upaya yang mesti dilakukan untuk mengatasi konflik-konflik kepentingan ekonomi-politik yang terjadi dalam pengelolaan perkotaan.

Dalam hal ini, Lefebvre mengadopsi pemikiran mengenai teori konflik seorang filsuf bernama Niccolo Machiavelli. Ruang di perkotaan menjadi sebuah arena pertarungan antara “the minuto popolo” (*small people*) dan “the popolo grasso” (*fat people*), antara mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam berbagai macam bentuknya dengan mereka yang bahkan suaranya saja tidak dapat terdengar di masyarakat. Dalam arti inilah wilayah perkotaan menjelma menjadi sebuah ruang konflik (*a place of conflict*), sebuah kata kunci yang diadopsi Lefebvre dari Machiavelli. Mereka yang berkuasa dan memiliki kewenangan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatur bagaimana wilayah perkotaan mesti dibentuk dan dikelola.

Lepas dari ancaman yang dimiliki oleh pihak penguasa, Lefebvre juga menegaskan adanya kesempatan untuk membentuk ruang sosial (*social space*) di mana masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengelola. Persis di sini, Biagi (2020), mengutip istilah yang ditawarkan Lefebvre, menyebutnya sebagai sebuah bentuk “revolusi urban” (*urban revolution*). Wilayah perkotaan menjadi tidak hanya didominasi dan diatur oleh kepentingan-kepentingan tertentu saja, misalnya kepentingan ekonomi atau politik segelintir orang. Lefebvre menyebut partisipasi masyarakat ini sebagai “*the work of art*” (*the city is an oeuvre*). Partisipasi dimaknai sebagai sebuah seni untuk terlibat aktif mengelola ruang di mana mereka hidup dan tinggal. Dengan demikian, masyarakat perkotaan tidak hanya dilihat sebagai pihak pasif yang tinggal, menjalani aktivitas di wilayah perkotaan, serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan perkotaan, tetapi juga berperan aktif untuk turut serta dalam berbagai macam bentuknya dalam mengelola perkotaan.

PENUTUP

Artikel ini telah menjabarkan apa yang dimaksud oleh Lefebvre dalam konsep mengenai ruang. Ia melihat bahwa ruang adalah sesuatu yang dinamis, yang dibentuk oleh beragam aspek yang terkait, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Secara khusus, dalam kerangka pikir Marxian, Lefebvre menunjukkan bahwa pengelolaan perkotaan telah diwarnai oleh kepentingan kapitalisme yang cenderung berkeinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan di wilayah perkotaan. Kondisi ini kemudian memunculkan dua ruang yang berbeda yang saling berkonflik satu sama lain dalam proses tata kelola perkotaan, yakni ruang abstrak yang dibentuk oleh para pemodal yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan ruang

sosial di mana masyarakat menghidupi kegiatannya sehari-hari. Untuk melawan hegemoni dan dominasi kapitalisme ini, Lefebvre mengusulkan perwujudan hak atas kota yang salah satu representasinya adalah membangun partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan perkotaan dan mewujudkan pengelolaan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biagi, Francesco. 2020. "Henri Lefebvre's urban critical theory: Rethinking the city against capitalism." *International Critical Thought*. 10:2, 214-231.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods: Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Christian, Yoppie dan Desmiwati. 2018. "Menuju urbanisasi pulau kecil: Produksi ruang abstrak dan perampasan." *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 2:1, 45-63.
- de Souza, Marcelo Lopes. 2015. "From 'the right to the city' to the right to the *planet*." *City*. 19:4, 408-443.
- Dwianto, Raphaella Dewantari. 2012. "Teori ruang dalam sosiologi perkotaan: Sebuah pendekatan baru." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*. Vol.17 No.1, Januari 2012, 49-63.
- Gottdiener, Mark *et al*. 2019. *The New Urban Sociology*. London: Routledge.
- Hammond, Lauren. 2019. "Utilising the 'production of space' to enhance young people's understanding of the concept of space." *Geography*. 104:1, 28-37.
- Marcuse, Peter. 2009. "From critical urban theory to the right to the city." *City*. 13:2-3, 185-197.
- Merrifield, Andy. 2006. *Henri Lefebvre: A Critical Introduction*. London: Routledge.
- Nadolny, Adam. 2015. "Henri Lefebvre's concept of urban space in the context of preferences of the creative class in a modern city." *Quaestiones Geographicae*. 34:2, 29-34.
- Nurhadi, Iwan *et al*. 2019. "Produksi ruang dan perubahan pengetahuan pada masyarakat sekitar objek wisata Waterland." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*. 3:1, 46-64.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum. 2016. "Produksi ruang dan revolusi kaum urban menurut Henri Lefebvre." <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>. Diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.
- Purcell, Mark. 2014. "Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city." *Journal of Urban Affairs*. 36:1, 141-154.
- Shields, Rob. 1999. *Lefebvre, Love, and Struggle: Spatial Dialectics*. London: Routledge.
- Thompson, Matthew. 2017. "LIFE in a ZOO: Henri Lefebvre and the (social) production of abstract space in Liverpool." *City*. 21:2, 104-126.
- Zieleniec, Andrzej. 2018. "Lefebvre's politics of space: Planning the urban as oeuvre." *Urban Planning*. Vol.3 Issue 3, 5-15.